



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 4
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja/ ke - 2
Dengan : Menteri Sosial RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : **Selasa, 13 Juni 2017**
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Pembicaraan Pendahuluan RAPBN RKP Tahun Anggaran 2018
Hadir : 1. orang dari 50 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.
2. Menteri Sosial beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI membahas “**Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP Tahun Anggaran 2018**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Sosial RI mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.063.900.000.000,- (*dua puluh dua triliun enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*), yang akan dialokasikan untuk program sebagai berikut:

No	Program	Indikatif 2018 (dalam ribuan)	Persentase
1	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	274.217.224	1,2%
2	Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	35.788.417	0,2%
3	Pemberdayaan Sosial	420.851.569	1,9%
4	Rehabilitasi Sosial	967.019.719	4,4%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.848.520.153	80,9%
6	Penanganan Fakir Miskin	2.177.747.818	9,9%
7	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Penyuluhan Sosial	339.755.100	1,5%
	Jumlah	22.063.900.000	100%

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 tersebut bersama Pejabat Eselon I Kementerian Sosial RI.

2. Dalam rangka melakukan penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018, Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Sosial RI untuk menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:

- a. Memperhatikan kualitas distribusi Beras Sejahtera (Rastra) yang lebih layak dan aman untuk dikonsumsi.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau memberikan prioritas menjadi pendamping PKH sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - c. Meningkatkan pengawasan atas penggalangan dana sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari penyimpangan.
 - d. Meningkatkan verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan mengoptimalkan peran TKSK dan Pendamping PKH.
 - e. Memperluas cakupan program E-Warung secara lebih merata ke berbagai daerah di Indonesia dengan menambahkan anggaran sesuai kebutuhan dan memindahkan anggaran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ke pagu anggaran Kementerian Sosial RI.
 - f. Memperluas cakupan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan aspirasi daerah.
 - g. Meningkatkan peran Kementerian Sosial RI sebagai salah satu elemen perekat kesetiakawanan sosial.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan penyelesaian regulasi yang mendukung kinerja Kementerian Sosial RI, antara lain revisi Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dan Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 4. Komisi VIII DPR RI mendukung upaya restrukturisasi Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Sosial RI.
 5. Komisi VIII DPR RI memandang perlu adanya alokasi tambahan anggaran untuk perluasan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan peningkatan fungsi Makam Pahlawan Nasional (MPN) sebagai destinasi wisata dan edukasi kebangsaan yang diintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
 6. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyusun kebijakan dan anggaran guna menuntaskan permasalahan pengungsi Maluku yang ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.